

Evaluasi Peran Humas Bawaslu Melalui Kolaborasi Mahasiswa dan Aktivistis pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Binjai

Evaluation of the Role of Bawaslu Public Relations Through Collaboration of Students and Activists in the 2024 Simultaneous Elections in Binjai City

Hengki Mangiring Parulian Simarmata^{1*}, Doris Yolanda Saragih², Erwin Sirait³,
Poltak Pardamean Simarmara⁴, Demak Claudia Yosephine Simanjuntak⁵, Jusra
Tampubolon⁶

^{1,4} Manajemen, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Indonesia

^{2,3} Teknik Komputer, Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar, Indonesia

⁵ Manajemen, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia,

⁶ Teknik Industri, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

hengkisimarmata.mm@gmail.com^{1*}, dorisyolandasaragih123@gmail.com², esirait946@gmail.com³,
simarmata.poltak@gmail.com⁴, demakclaudiayosephinesimanjuntak@unprimdn.ac.id⁵,
jusratampubolon@unprimdn.ac.id⁶

Alamat Kampus: Jl. Sriwijaya, Melayu, Kec.Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera
Utara 21146, Indonesia.

Korespondensi penulis: hengkisimarmata.mm@gmail.com

Article History:

Received: Februari 23, 2025;

Revised: Maret 06, 2025;

Accepted: Maret 22, 2025;

Published: Maret 25, 2025

Keywords: Bawaslu Public
Relations, Students and Activists,
Voter Participation

Abstract: This Community Service (PKM) activity aims to evaluate the role of Bawaslu's public relations in increasing public participation in the 2024 Simultaneous Elections, through collaboration with students and activists. The activity was carried out in the form of a seminar and forum group discussion (FGD) involving 50 participants from students and activists in Binjai City. This event was held on March 6, 2025, at the Graha Kardopa Hotel. Through the presentation of material by speakers from Bawaslu North Sumatra, and Management Lecturers from Prima Indonesia University as well as open discussion sessions, this activity encourages a deeper understanding of the strategic role of public communication and public relations in the implementation of transparent and participatory elections. The evaluation results showed that collaboration between students, activists, and Bawaslu was able to strengthen the effectiveness of political communication and increase the participatory awareness of the younger generation. This activity is expected to be a model of educational synergy between election organizing institutions and civil society groups in supporting healthy and inclusive democratic practices.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kehumasan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024, melalui kolaborasi dengan mahasiswa dan aktivis. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan forum group discussion (FGD) yang melibatkan 50 peserta dari kalangan mahasiswa dan aktivis di Kota Binjai. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2025, bertempat di Graha Kardopa Hotel. Melalui pemaparan materi oleh narasumber dari Bawaslu Sumatera Utara, dan Dosen Manajemen Universitas Prima Indonesia serta sesi diskusi terbuka, kegiatan ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis komunikasi publik dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan partisipatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, aktivis, dan Bawaslu mampu memperkuat efektivitas komunikasi politik dan meningkatkan kesadaran partisipatif generasi muda. Kegiatan ini diharapkan menjadi model sinergi edukatif antara lembaga penyelenggara pemilu dan kelompok masyarakat sipil dalam mendukung praktik demokrasi yang sehat dan inklusif.

Kata Kunci: Humas Bawaslu, Mahasiswa dan Aktivistis, Partisipasi Pemilih

1. PENDAHULUAN

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia merupakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dengan mengatasi tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan meningkatkan partisipasi pemilih muda (Kalembang, 2024). Upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara diperlukan untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis (Agustin et al., 2024). Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi dan pemahaman politik di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, yang notabene merupakan pemilih pemula dan segmen strategis dalam proses demokrasi (Marzuki & Ginting, 2018). Meskipun ada tantangan dalam partisipasi politik generasi muda, penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, seperti pendidikan kewarganegaraan dan pemanfaatan teknologi digital, partisipasi dan pemahaman politik dapat ditingkatkan (Fernández Guzmán Grassi et al., 2024). Generasi muda memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam proses demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi yang lebih modern dan relevan dengan konteks mereka (Ferreira & Menezes, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu perlu dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai unsur seperti lembaga pengawas pemilu, akademisi, serta komunitas aktivis.

Peran kehumasan Bawaslu sangat signifikan dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan. Dengan strategi komunikasi yang efektif, pengawasan partisipatif, dan optimalisasi media sosial, Bawaslu dapat meningkatkan partisipasi publik dan mencegah pelanggaran pemilu. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan evaluasi strategi harus diatasi untuk mencapai tujuan ini (Hermawan, 2023). Melalui strategi komunikasi yang tepat, humas dapat membangun pemahaman publik terhadap fungsi pengawasan pemilu dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi (Siregar, 2022). Namun, keberhasilan komunikasi ini sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan satu arah seringkali tidak efektif dalam menjangkau generasi muda yang lebih responsif terhadap dialog dan keterlibatan langsung.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik untuk menjembatani peran humas Bawaslu dan kelompok mahasiswa serta aktivis. Melalui seminar dan forum group discussion (FGD), mahasiswa dan aktivis tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra dialog yang aktif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik, memperluas pemahaman

tentang mekanisme pengawasan pemilu, serta membangun jejaring kolaborasi yang berkelanjutan (Putri & Hidayat, 2021). Dengan memfasilitasi ruang diskusi yang terbuka dan partisipatif, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan yang turut menyuarakan pentingnya pengawasan pemilu di tengah masyarakat.

Kota Binjai dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai representatif dalam menggambarkan kondisi sosial politik di Sumatera Utara, serta memiliki komunitas akademik dan aktivis yang aktif. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025, bertempat di Graha Kardopa Hotel, dan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis dari berbagai latar belakang. Antusiasme peserta menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi politik yang lebih intensif dan mendalam. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan informasi, memperkuat sinergi, dan menciptakan gerakan partisipatif dalam mengawal demokrasi. Selain itu, terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama yang erat antara Universitas Prima Indonesia, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, serta universitas-universitas lainnya yang berada di Kota Medan sebagai peserta sekaligus mitra akademik dalam kegiatan ini.

2. METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra utama. Bawaslu dipilih karena memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi, khususnya dalam hal komunikasi publik dan penyebaran informasi pemilu kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi eksploratif, ditemukan bahwa masih diperlukan penguatan strategi komunikasi publik melalui kehumasan, khususnya dalam melibatkan mahasiswa dan aktivis sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi pemilu. Proses perencanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi permasalahan melalui wawancara informal dan FGD awal dengan pihak Bawaslu terkait kendala dalam menjangkau pemilih muda dan belum optimalnya pendekatan kolaboratif humas dalam kegiatan sosialisasi;
- b. Penyusunan rencana kegiatan yang mencakup penentuan tema dan substansi materi, pemilihan metode pelaksanaan, serta penjadwalan kegiatan;
- c. Koordinasi dengan stakeholder, yaitu Universitas Prima Indonesia, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, serta beberapa universitas lainnya di Kota Medan, yang turut menjadi peserta sekaligus mitra kegiatan.

Strategi pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis dialog interaktif, di mana seluruh peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga turut berkontribusi aktif dalam diskusi dan refleksi kritis. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan forum diskusi kelompok (FGD), dengan mengusung topik utama “Evaluasi Peran Humas Bawaslu Melalui Kolaborasi Mahasiswa dan Aktivis pada Pemilu Serentak 2024”. Kegiatan berlangsung di Graha Kardopa Hotel, Kota Binjai, pada 6 Maret 2025, dengan melibatkan 50 peserta terpilih yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan.

Tahapan Kegiatan

- a. Tim pelaksana melakukan audiensi awal dengan Bawaslu Sumatera Utara untuk menyepakati konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- b. Penentuan peserta kegiatan dilakukan melalui pendaftaran terbuka dan undangan resmi, difokuskan kepada mahasiswa aktif dan aktivis organisasi kemasyarakatan.
- c. Penyusunan materi seminar difokuskan pada peran strategis humas dalam edukasi politik, regulasi komunikasi publik, serta pengalaman terbaik dalam pelaporan informasi pemilu.
- d. Penyebaran undangan dilakukan oleh panitia bekerja sama dengan jaringan kampus dan mitra Bawaslu di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Bawaslu Sumatera Utara.
- b. Pemaparan materi oleh narasumber ahli dari Bawaslu dan akademisi bidang komunikasi politik, dengan fokus pada strategi komunikasi publik, penguatan peran humas, serta studi kasus partisipasi pemilih muda.
- c. Sesi FGD dipandu oleh moderator berpengalaman dengan pendekatan reflektif-partisipatif untuk menggali pandangan dan pengalaman peserta dalam pengawasan pemilu berbasis komunitas.

Evaluasi dan Penutupan

- a. Evaluasi dilakukan melalui kuisisioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
- b. Penyampaian kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pengembangan program komunikasi publik Bawaslu ke depan.
- c. Kegiatan ditutup dengan penyampaian apresiasi dan dokumentasi bersama.

3. HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dan forum group discussion (FGD) yang melibatkan 50 peserta dari kalangan mahasiswa dan aktivis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara, khususnya dari Kota Medan dan Binjai. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Bawaslu Sumatera Utara, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Universitas Prima Indonesia, serta universitas-universitas lain sebagai peserta aktif dalam kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pada 6 Maret 2025 di Graha Kardopa Hotel, Kota Binjai menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran yang mencapai 100%, partisipasi aktif dalam diskusi, serta hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan pasca kegiatan. Kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh perwakilan Bawaslu, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri ahli, dan diakhiri dengan diskusi kelompok yang membahas kendala aktual di lapangan.

Pendekatan partisipatif digunakan dalam kegiatan ini untuk menggali pemahaman serta memperkuat keterlibatan peserta dalam menanggapi isu keterbukaan informasi publik. Peserta diberikan ruang untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing, khususnya dalam aspek komunikasi publik, keterbukaan informasi, dan pelaporan kegiatan. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh isi dan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menanggapi kondisi tersebut, kegiatan dilengkapi dengan materi pelatihan teknis yang mencakup pemahaman regulasi, praktik baik penyusunan laporan, serta simulasi teknis pelaporan yang akuntabel dan transparan. Pemateri berasal dari unsur akademisi dan praktisi, khususnya dari Universitas Prima Indonesia dan Bawaslu Sumatera Utara. Penyampaian materi difokuskan pada bagaimana membangun laporan yang tidak hanya informatif tetapi juga sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas publik.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, yang menunjukkan hasil positif. Sebelum pelaksanaan kegiatan, hanya sekitar 40% peserta yang memahami indikator dan prinsip keterbukaan informasi publik. Setelah pelaksanaan seminar dan FGD, tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi lebih dari 85%, menunjukkan bahwa materi dan metode yang digunakan efektif meningkatkan literasi peserta terhadap isu tersebut. Selain peningkatan pemahaman, diskusi juga berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan

utama yang dihadapi peserta, antara lain:

- a. Minimnya kemampuan dalam mengelola laporan digital yang sesuai standar;
- b. Rendahnya pemahaman aspek hukum dan risiko bila pelaporan tidak dilakukan secara benar;
- c. Belum adanya standar pelaporan internal di beberapa unit kerja peserta.

Dari hasil tersebut, disepakati bahwa diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan, penyusunan pedoman teknis pelaporan internal, dan pembentukan tim kolaborasi antara Bawaslu dan akademisi sebagai mitra strategis dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan dan pelaporan informasi.

Sebagai bagian dari dokumentasi, beberapa hasil kegiatan ditampilkan dalam bentuk foto saat seminar dan FGD berlangsung, termasuk sesi presentasi dari narasumber utama, yaitu Bapak Jusra Tampubolon, S.T., M.M., serta penutupan oleh Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Bapak Saut Boangmanalu, S.Th., M.M..

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik, serta mendorong kolaborasi antara institusi pengawasan pemilu dan kelompok masyarakat sipil dalam menciptakan budaya pelaporan yang transparan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh mitra institusi pendidikan, khususnya Universitas Murni Teguh, Universitas Prima Indonesia, dan universitas lainnya yang terlibat langsung sebagai peserta aktif.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan ruang kolaboratif antara mahasiswa, aktivis, dan Bawaslu Sumatera Utara dalam mengevaluasi dan memperkuat strategi komunikasi publik melalui kehumasan. Materi yang disampaikan oleh Jusra Tampubolon, S.T., M.M., memaparkan pentingnya kehumasan dalam konteks pemilu sebagai jembatan informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat foto kegiatan ditunjukkan gambar 1 dan 2. Kehumasan berperan penting dalam memastikan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif (Samoilenko et al., 2024). Dengan strategi komunikasi yang efektif dan kolaborasi dengan jurnalisme, kehumasan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, yang semuanya penting untuk pemerintahan yang baik dan stabil (Ndraha et al., 2024).



Gambar 1. Pemaparan dari Narasumber



Gambar 2. Kegiatan Seminar sedang berlangsung

Salah satu aspek penting dalam diskusi adalah bagaimana media sosial telah menjadi kanal utama komunikasi publik, terutama di kalangan pemilih muda. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari generasi digital, mampu menjadi agen perubahan melalui penyebaran informasi valid, diskusi publik, dan kegiatan fact-checking. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa platform digital seperti Instagram dan TikTok kini lebih efektif dalam menyampaikan pesan politik dibandingkan media konvensional (Ismawan et al., 2024).

Selain itu, peserta seminar juga mencatat bahwa tantangan utama dalam strategi humas pemilu adalah penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya komunikasi dua arah antara Bawaslu dan masyarakat. Tantangan ini mendorong perlunya literasi digital yang lebih masif dan terstruktur. Dalam materi yang disampaikan, disorot pentingnya prinsip kehati-hatian dalam membagikan informasi dan verifikasi silang sebelum menyebarkan konten (Winger et al., 2023). Literasi digital menjadi prasyarat agar strategi humas berjalan secara efektif dan tidak justru memperkuat disinformasi.

Diskusi juga menggarisbawahi peran mahasiswa sebagai mitra strategis dalam komunikasi politik, terutama dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum aktif dalam pemilu. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berkontribusi melalui penyelenggaraan diskusi publik, pelatihan literasi digital, serta kampanye media sosial berbasis data. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam PKM memiliki

dampak ganda: membekali peserta dengan keterampilan baru sekaligus memperluas jangkauan pesan publik Bawaslu (Setiadi et al., 2023).

Pentingnya penggunaan data dalam strategi komunikasi pemilu juga menjadi sorotan. Segmentasi pesan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku digital memungkinkan humas untuk merancang kampanye yang lebih tepat sasaran. Materi seminar juga menekankan pentingnya pesan sederhana, visual menarik, dan pemahaman audiens sebagai bagian dari strategi komunikasi efektif (McNally et al., 2017).

Secara umum, kegiatan ini tidak hanya memperkuat fungsi edukatif PKM, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat diterapkan oleh Bawaslu dalam merancang strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat di masa depan. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi seperti ini menjadi bentuk nyata sinergi dalam penguatan demokrasi berbasis partisipasi. Setelah kegiatan dilakukan foto bersama pada gambar 3.



Gambar 3. Foto bersama pemateri dan mahasiswa

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran kehumasan Bawaslu melalui pendekatan kolaboratif bersama mahasiswa dan aktivis. Melalui pelaksanaan seminar dan forum group discussion (FGD), kegiatan ini mendorong peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Materi yang disampaikan oleh narasumber, khususnya terkait strategi komunikasi pemilu, literasi digital, dan pelibatan pemuda, menunjukkan bahwa humas Bawaslu memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik dan melawan disinformasi. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital terbukti mampu berperan aktif sebagai agen perubahan, baik melalui penyebaran informasi yang valid, edukasi

politik, maupun pengawasan pemilu berbasis komunitas. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, teknik penyusunan laporan yang akuntabel, serta tantangan komunikasi pemilu di era digital. Kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan seperti maraknya hoaks, terbatasnya komunikasi dua arah, dan rendahnya literasi digital di kalangan penyelenggara dan masyarakat, yang perlu ditindaklanjuti melalui program berkelanjutan.

Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas kognitif peserta, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif antara akademisi, mahasiswa, aktivis, dan lembaga pengawas pemilu. Kegiatan ini menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain, khususnya dalam penguatan komunikasi publik berbasis data dan pelibatan komunitas dalam demokrasi. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh kekuatan strategi komunikasi dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi tindak lanjut seperti pelatihan keterbukaan informasi publik berbasis teknologi, penyusunan pedoman pelaporan internal Bawaslu, serta penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan penyelenggara pemilu guna mendukung praktik demokrasi yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara yang telah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Universitas Prima Indonesia, serta universitas-universitas lain di Kota Medan yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta dan pendukung kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>
- Fernández Guzmán Grassi, E., Portos, M., & Felicetti, A. (2024). Young people's attitudes towards democracy and political participation: Evidence from a cross-European study – Corrigendum. *Government and Opposition*, 59(2), 632–632. <https://doi.org/10.1017/gov.2023.33>

- Ferreira, P. D., & Menezes, I. (2021). Editorial: The civic and political participation of young people: Current changes and educational consequences. *Frontiers in Political Science*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.751589>
- Hermawan, H. (2023). Pengembangan strategi komunikasi yang efektif pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.32509/dianmas.v3i1.3147>
- Ismawan, D., Safrina, S., & Zain, A. (2024). Modern media in the 2024 Banda Aceh regional elections: Effectiveness of use, challenges and impacts. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*, 186–195. <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i3.75>
- Kalembang, J. V. (2024). Potential for the 2024 election and consolidation of Indonesian democracy. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v5i1.409>
- Marzuki, & Ginting, J. (2018). Realizing simultaneous and quality regional head election through strengthening supervision function: Study at the General Election Supervisory Board of North Sumatra Province. *Proceedings of the 7th International Conference on Multidisciplinary Research*, 438–445. <https://doi.org/10.5220/0008888704380445>
- McNally, M.-A., Cerbone, D., & Maroun, W. (2017). Exploring the challenges of preparing an integrated report. *Meditari Accountancy Research*, 25(4), 481–504. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2016-0085>
- Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., & Zega, A. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(2), 23–31. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.37>
- Samoilenko, L., Sharyi, V., & Zahrebelna, A. (2024). Crisis of trust in government: The role of public relations in its restoration. *Public Administration and Regional Development*, 26, 1196–1214. <https://doi.org/10.34132/pard2024.26.05>
- Setiadi, H., Silitonga, M. S., & Sutrisno, E. (2023). The strategy of the Election Supervisory Agency in the West Java region in increasing community participatory supervision. *Dia*, 21(1), 109–122. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7670>
- Winger, G., Calfano, B., Vicić, J., & Harknett, R. (2023). Electoral crisis communications: Combatting disinformation & the contest for electoral legitimacy. *American Politics Research*, 51(5), 608–618. <https://doi.org/10.1177/1532673X231184440>